

TROBUNAL

Bilingual Communication and Documentation of The Religious High Court of Bandar Lampung

KALEIDOSKOP 2019

Kaleidoscope 2019

LAPORAN UTAMA/ MAIN REPORT

Zona Integritas
Menuju WBK
dan WBBM

*Integrity Zone to
WBK and WBBM*

ENSIKLOPEDI/ ENCYCLOPEDIA

Mengapa Gugatan Perdata
Diputus Secara Verstek?

*How Is Lawsuite Disposed
by Default Judgment*

CAKRAWALA/ THE HORIZON

Peradilan Agama Menjawab
Tantangan Reformasi Birokrasi

*Religious Court Responds
to Judicial Reform*

Pertama, Majalah Peradilan Dalam Dua-Bahasa

First, Judiciary Magazine on Bilingual

TRIBUNAL PTA Bandar Lampung

Edisi Perdana | Februari 2020
Firs Edition | February 2020

Hal./Page : 1-5

Sambutan Dirjend Badilag

Acknowledgement by Director General of Religious Courts Agency

Hal./ Page 6-7

Sambutan KPTA Bandar Lampung

Acknowledgement by Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court

Hal./ Page 8-13

Laporan Utama / Main Report:

Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Integrity Zone Towards Corruption Free Zone and Clean and Serving Bureaucracy

Hal./Page 14-27

Kaleidoskop 2019 PTA Bandar Lampung

Bandar Lampung Religious High Court on Kaleidoscope 2019

Hal./Page : 28-55

Dinamika Peradilan Agama / Judiciary Update

Pengadilan Agama se-wilayah PTA Bandar Lampung Religious Court all around Lampung Province

Hal./Page : 56-61

Cakrawala / The Horizon:

Peradilan Agama Menjawab Tantangan Reformasi Peradilan Religious Court Responds to Judicial Reform

Hal./Page : 62-65

Ensiklopedi / Encyclopedia:

Kewenangan Peradilan Agama
Jenis-jenis Putusan

*The Competencies of Religious Courts
Types of Court Decision*

Tribunal adalah Majalah Dwi Bahasa empat bulanan yang diterbitkan oleh PTA Bandar Lampung. Nama Tribunal diambil dari bahasa Inggris yang berarti "Pengadilan" atau "Peradilan".

Majalah ini merupakan media komunikasi dan diseminasi informasi, inovasi peradilan, kebijakan-kebijakan terbaru, dan proyeksi PTA Bandar Lampung ke depannya. Disajikan dalam dua bahasa, yaitu Indonesia-Inggris, majalah ini diharapkan tidak hanya menjadi preferensi bagi lembaga atau institusi, praktisi dan akademisi hukum dan peradilan dalam negeri, namun juga dunia internasional. /IDN

Tribunal is a quarterly bilingual magazine published by Bandar Lampung Religious High Court. The name Tribunal is taken from English which means "court" or "judiciary". This magazine is a medium of communication and information dissemination, judicial innovation, the latest policies, and the Bandar Lampung Religious High Court future plans. Presented in two languages, in Indonesian-English, this magazine is expected to not only be a preference for legal institutions, practitioners and academics in domestic law and justice, but also internationally. /ENG

DEWAN REDAKSI Redactor Board



Pelindung/ Advisor :

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung/
Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court

Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Vice Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Penanggung Jawab/ Person in Charge :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Clerk of Bandar Lampung Religious High Court

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Secretary of Bandar Lampung Religious High Court

Pimpinan Redaksi/ Chief Redactor :

Ujang Solihin
Sekretaris Redaksi/ Editorial Secretary :
Yosrinaldo Syarief

Redaktur Pelaksana/ Managing Editor :

Tata Naskah/ Editor : Ade Firman Fathony
Tata Letak/ Layouter : Dodi Alaska AS
Penerjemah/Translator : M. Natsir Asnawi
Ilustrasi/ Illustrator : Restu Yuniarti
Distribusi/ Distribution : M. Agus Wibowo

Kontributor :

Seluruh Pengadilan Agama Se-Lampung
Religious Court all around Lampung Province

Alamat Redaksi / Address:

Jl. Basuki Rahmat No. 24 Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35211.

Alamat Surat Elektronik / E-Mail :
redaktur.tribunalbandarlampung@gmail.com

IISN : 0000000

Sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag)
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.



Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karuniaNya kepada kita semua, Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir, Amiin..

None else we praise except to Allah Subhanah wata'ala who has fully blessed, bestowed his mercy, guidance, and grace us all. Shalawat and greetings may always be devoted to our great prophet Muhammad SAW, may we all blessed by his intercession in the last day, amin.

Peradilan Agama tidak hanya menangani perkara cerai dan akibat hukumnya, namun juga berwenang mengadili sengketa ekonomi Syariah, sengketa kewarisan, harta Bersama, hak asuh anak, melaksanakan eksekusi hak tanggungan Syariah, dan kewenangan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kompleksnya jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut menuntut Pengadilan Agama harus terus berbenah dan berinovasi agar kewenangan-kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan memastikan terwujudnya pelayanan prima kepada seluruh pencari keadilan.

Religious Courts have the competence to adjudicate any cases related to family law matters but not only divorce suit and all of its legal impact.

Moreover, Religious Courts have the competence to adjudicate lawsuits about sharia economics, inheritance, matrimonial property, child custody, executing sharia mortgage, and other competence attributed by state act. The so-called competence insist Religious Courts to keep improving and innovating in order to perform them as we expect and implementing excellent services to all of the justice seekers.

Ditjend Badilag sepanjang tahun 2019 telah mengadakan kerja sama dengan sejumlah negara, yaitu Arab Saudi, Maroko, Australia, Qatar, Bahrain, Malaysia, dan Inggris (Universitas Oxford). Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Badilag untuk memperkuat administrasi peradilan serta pembaruan manajemen dan tata kelola lembaga peradilan. kerja sama ini sekaligus menunjukkan bahwa Badilag tidak pernah berhenti berinovasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan baru yang tidak hanya bertaraf nasional namun juga internasional.

Throughout 2019, Badilag has carried out collaboration along with a couple of countries, i.e. Saudi Arabia, Morocco, Australia, Qatar, Bahrain, Malaysia, and England (Oxford University). It represents Badilag effort to affirm judicial administration and also renewing management and governance of the judiciary. It is also shown us that Badilag has never stopped their innovation and developing new policies covering not only national scope but international, respectively.

Beberapa tahun belakangan ini, inovasi-inovasi di lembaga peradilan agama selalu lahir, tumbuh dan berkembang di mana-mana, bak tunas tunas yang selalu muncul di musim penghujan. Inovasi tidak hanya lahir dan dimunculkan dari atas, tetapi inovasi juga lahir dari bawah, dari daerah-daerah. Saya selaku Dirjen, selalu merasa bangga dan terharu saat mendapat kabar dan laporan mengenai adanya inovasi-inovasi baru yang muncul dari daerah. Ibarat orang tua yang terharu

saat melihat rapot sekolah anaknya selalu mendapat nilai yang baik.

By the most recent years, religious courts have massively generated innovations to support judicial administration. These innovations have not been only generated as a top down management, but also delivered by religious court in all over regencies/cities. As a Director General, I would always be proud and get touched for every single information about innovations generated by religious courts in all over regencies/cities. Let's say, as a parent, we would always get happier for every moment we found that our children has a good or even an excellent school achievement.

Badilag sendiri, selalu melahirkan inovasi-inovasi baru serta terus mengembangkan dan menyempurnakannya. Lebih dari itu, Badilag juga selalu mengajak dan mensosialisasikan inovasi-inovasi tersebut kepada seluruh satker yang berada di seluruh Indonesia agar dapat diimplementasikan di daerahnya



Dirjen Badilag Bersama dengan Pimpinan Mahkamah Agung saat melakukan kunjungan kerja di Riyadh, Arab Saudi

Director General of Religious Court Agency along with Supreme Court Headship on a working visit in Riyadh, Saudi Arabia

masing-masing. Dan akan lebih baik jika mampu dikembangkan dan disempurnakan secara mandiri sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga dapat lebih tepat guna dan mampu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Directorate General of Religious Court (Badilag) always insist to generate brand new innovations and keep developing the to date innovations. Moreover, Badilag has also persuaded and disseminated them to all of work units so that it can be implemented to enhance court services. Furthermore, on the build upon these innovations, we hope all of work units find themselves upgrade and polish up every applied innovations due to the needs of excellent services in every regency/city.

Selama ini, satker-satker yang berada di daerah sangat mendukung dengan program-program dan inovasi-inovasi dari Badilag, baik satker tingkat pertama maupun tingkat banding. Bahkan lebih dari itu, ada beberapa satker yang meskipun sudah menerapkan inovasi dan aplikasi dari Badilag, tetap tidak pernah berhenti berinovasi dengan melahirkan hal-hal baru untuk satkernya masing-masing. Baik inovasi dalam bentuk prosedur pelayanan publik, inovasi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, inovasi dalam bentuk aplikasi penunjang tugas pokok, maupun inovasi dalam hal publikasi dan informasi publik.

To date, all of work units in first instance or even in appeal court, has completely support every Badilag's innovation and program. Evenmore, there were couple work units keep innovating and inventing their public services, providing court facilities, producing start-up to support core business, and innovations related to publication and public accessibility to court information.

Sebagaimana yang PTA Bandar Lampung telah lakukan terakhir ini, dengan menyediakan akses informasi dan publikasi dalam bentuk majalah dua-bahasa atau bilingual. Majalah ini nanti dikabarkan akan memuat dan menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan, inovasi dan kebijakan yang ada di di PTA maupun yang ada di seluruh Pengadilan Agama yang berada di wilayah PTA Bandar Lampung.

The Religious High Court of Bandar Lampung has just took part in such innovations to disseminate information by issuing bilingual magazine. It would inform public and stakeholders all activities, innovations, and the latest policies by Religious High Court of Bandar Lampung and all Religious Court of the first instance over Lampung Province.

Majalah tersebut juga menggunakan dua bahasa sekaligus dalam penyajiannya, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sehingga dapat diakses dan dibaca tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh dunia internasional. Ini adalah terobosan baru di dunia peradilan, dimana inovasi yang dilahirkan tidak hanya menasar masyarakat yang berada di wilayah hukumnya, tetapi juga menasar hingga masyarakat internasional, dan sudah saatnya bagi kita untuk tidak abai akan pentingnya peran dunia internasional bagi dunia peradailan di Indonesia, khususnya bagi lingkungan Peradilan Agama.

The magazine uses two languages or bilingual (Indonesian - English) in every report or article served on each subtheme. Hence, it could be read not only by Indonesians, but also International society. It is just an incredible breakthrough to our judiciary, because it cover both Indonesians and International readers. It insists us, somehow, to not ignoring the urgency of the role of international society toward Indonesian judiciary, particularly for Religious Court.

Visitasi Tim Redaksi Majalah Dwi Bahasa Tribunal ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. dalam rangka penerbitan edisi perdana.

Editorial Board of Tribunal Bilingual Magazine visited Director General of Religious Court Agency, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. concerning the very first publishing of the magazine.



Sambutan KPTA Bandar Lampung Untuk Edisi Perdana

Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.



Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Praise the presence of Allah SWT for all his mercy and guidance to us all. Prayers and greetings may always be devoted to the Prophet Muhammad.

Media publikasi dan komunikasi di dunia peradilan dituntut untuk selalu berinovasi sehingga mampu menjangkau ke seluruh pelosok negeri. Di sisi lain, era Industri 4.0 menuntut akses informasi yang mampu menjangkau keseluruhan penjuru dunia. Dan saat ini, dunia Internasional membutuhkan media komunikasi dan publikasi yang menggunakan bahasa pergaulan Internasional, yakni bahasa Inggris.

Publications and communications media in the world of justice are required to always innovate so that they are able to reach all corners of the country. On the other hand, the Industrial 4.0 era demanded access to information capable of reaching all corners of the world. And now, the world International

requires communication and publications media that use international lingua franca, namely English.

PTA Bandar Lampung menyadari sepenuhnya akan pentingnya hal tersebut. Untuk itu, di awal tahun 2020 ini, PTA Bandar Lampung telah membentuk sebuah tim yang khusus ditugaskan untuk itu. Kali ini PTA Bandar Lampung memilih untuk menerbitkan sebuah majalah atau buletin, yang dalam penyajiannya digunakan dua bahasa sekaligus, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bandar Lampung Religious High Court is fully aware of this importance. For this reason, at the beginning of 2020, Religious High Court of Bandar Lampung had formed a team assigned to it. Bandar Lampung Religious High Court of choose to publish a magazine or bulletin, which in its presentation used two languages at once, namely Indonesian and English.

Tim yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 52/SK/OT.1/2/2020 tanggal 6 Februari 2020 tersebut ditugaskan mulai dari mempersiapkan konsep, mengumpulkan bahan dan materi, hingga menyusun draft majalah, sehingga layak untuk dicetak dan diterbitkan.

The team that was formed based on Decree Number 52/SK/OT.1/2/2020 dated February 6, 2020 was assigned starting from preparing the concept, gathering materials and materials, to compiling a magazine draft, so that it was feasible to be printed and published.

Majalah ataupun buletin dua-bahasa ini mendapat bimbingan langsung dari Ibu Wakil Ketua PTA Bandar Lampung yang didampingi oleh Panitera dan

sekretaris PTA, serta diisi oleh tim radaktur yang memiliki komitmen kuat terhadap kemajuan dunia peradilan di Indonesia, khususnya di wilayah PTA Bandar Lampung ini.

This bilingual magazine by the guidance from the PTA Bandar Lampung Deputy Chairperson, accompanied by the Registrar and secretary, and is filled with a team who have a strong commitment to the advancement of the judicial world in Indonesia, particularly in the Religious High Court of Bandar Lampung region.

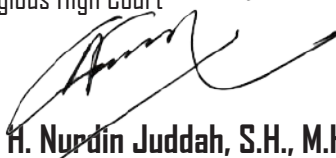
Majalah yang selanjutnya diberi nama "Tribunal" PTA Bandar Lampung ini merupakan produk orisinil hasil kerja keras putra-putri terbaik warga peradilan di seluruh wilayah PTA Bandar Lampung. Oleh karena itu, Saya berharap semoga Majalah dua-bahasa ini dapat terus terbit secara berkala untuk edisi-edisi berikutnya, dan dapat menjadi media komunikasi dan aktualisasi baik oleh PTA, maupun untuk seluruh pengadilan agama yang berada di wilayah PTA Bandar Lampung ini.

The magazine, which was subsequently given the name "PTA Tribunal" Bandar Lampung, was the original product of the hard work of the best sons and daughters of judicial residents in the entire PTA Bandar Lampung region. Therefore, I hope that this two-language magazine can continue to be published periodically for the next editions, and can be a communication and actualization medium for the PTA Bandar Lampung, and for all religious courts in the PTA region of Bandar Lampung.

Terakhir, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensukseskan terbitnya majalah dua-bahasa Tribunal PTA Bandar Lampung ini, semoga dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua, serta bermanfaat bagi seluruh pembacanya, Amiin...

Finally, I would like to thank all those who have supported and succeeded in the publication of the bilingual magazine PTA Tribunal Lampung Airport. Hopefully it can provide benefits and blessings for all of us, as well as benefit all of its readers, Amin ...

Chief Judge of Bandar Lampung
Religious High Court



Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.



ZI : Zona Integritas

WBK : Wilayah Bebas dari Korupsi

WBBM : Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



MEWUJUDKAN PEMIMPIN YANG TANGGUH, BERBUDAYA MELAYANI
MENUJU PERADILAN MODERN

Oleh: Drs. Arief Hidayat, S. H., M.M.

(Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI)



Sekretaris Ditjend Badilag bersama Ketua Mahkamah Agung Australia

Secretary of Religious Court Agency with Chief Justice of The Supreme Court of Australia

Pendahuluan

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah menetapkan Program Prioritas, diantaranya adalah Implementasi 9 Inovasi + 2 Inovasi, Implementasi e-court sampai proses e-litigasi, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, Decorum Ruang Sidang, dan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan).

Preliminary:

In year 2020, the Directorate General of the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia has established Priority Programs: 9 Innovations + 2 Innovations Implementation, e-court to e-litigation implementation, Integrity Zone (ZI) Development towards WBK and WBBM, Decorum Courtroom, and K3 (Cleanliness , Beauty and Neatness).

11 Inovasi sudah harus diimplementasikan oleh seluruh satker Peradilan Agama se-Indonesia yaitu Aplikasi Informasi Perkara, Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, Aplikasi Antrian Sidang Online, Aplikasi PNBP, Aplikasi e-Register, Aplikasi e-Kuangan, Aplikasi e-Eksaminasi, dan Pemanfaatan Command Center Badilag. serta 2 Inovasi yaitu Aplikasi Gugatan Mandiri dan Aplikasi Validasi Akta Cerai.

All 11 Innovations mentioned above have to be implemented by all Indonesian Religious Court: Case Information Applications, Case Notification Applications, Poverty Integrated Database Applications, Online Session Queue Applications, PNBP Applications, e-Register Applications, e-Finance Applications, e-Examination Applications , and the use of the Badilag Command Center. and 2 Innovations

namely Independent Claims Application and Divorce Deed Validation Application.

Implementasi pemanfaatan e-court dilingkungan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sudah sangat menggembirakan, terbukti banyaknya masyarakat baik pengguna terdaftar dalam hal ini para advokat yang berperkara maupun masyarakat luas sudah menggunakan layanan e-court, sejak terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Di tahun 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendorong seluruh Pengadilan Agama untuk melangkah lebih jauh lagi bukan hanya memanfaatkan layanan e-court dalam hal pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan secara elektronik, tetapi sudah harus melaksanakan kepada tahapan persidangan secara elektronik.

The e-court implementation in the Religious Courts throughout Indonesia has been very encouraging, as showed by the large number of people, both registered (lawyers) and the community have used e-court services, since the issuance of Perma Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Electronic Courts. In year 2020, the Directorate General of the Religious Courts encourages all Religious Courts to go a step further not only to utilize e-court services in terms of electronic registration, payment and summons, but must already carry out the electronic trial stage.

Tentang Decorum Ruang Sidang dan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan), Ditjen Badilag saat ini sedang mengadakan lomba penataan Decorum Ruang Sidang dan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan) untuk kategori Pengadilan Agama Kelas IA, Pengadilan Agama Kelas IB, Pengadilan Agama Kelas II, dan Pengadilan Agama Kelas II satker baru, dimana seluruh satker se-Indonesia yang menjadi utusan masing-masing Pengadilan Tingkat Banding wajib mengupload video Decorum Ruang Sidang dan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan) untuk nanti

dinilai dan ditentukan pemenangnya.

About the Courtroom and K3 Decorum (Cleanliness, Beauty and Neatness), the Directorate General of Badilag is currently holding a Decorum of the Courtroom and K3 Arrangement (Cleanliness, Beauty and Neatness) for the categories Class IA Religious Courts, Class IB Religious Courts, Class II Religious Courts, and the Class II New Religious Court, throughout Indonesia, who were delegates of each Court of Appeals were required to upload a video of the Courtroom and K3 Decorum (Cleanliness, Beauty and Neatness) to be assessed and determined by the winner.

Tentang Pembangunan Zona Integrias (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kemenpan RB telah menyelenggarakan Acara Apresiasi dan Penganugeran Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2019, bertempat di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. Sebanyak 63 Unit kerja (Pengadilan) menjadi penerima predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 yang terdiri dari 28 Peradilan Agama, 27 Peradilan Umum, 5 Peradilan Militer dan 2 Peradilan Tata Usaha Negara.

Regarding the Development of Integrias Zone (ZI) towards a Free from Corruption Region (WBK) and the Clean and Serving Bureaucracy Region (WBBM), Kemenpan RB has organized the Appreciation and Granting of Integrity Zones Towards a Region Free of Corruption (WBK) and the Clean and Serving Bureaucracy Region (WBBM). WBBM) 2019, located at Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Tuesday, December 10, 2019. A total of 63 work units (Courts) became recipients of the Integrity Zone heading to the Region Free from Corruption (WBK) in 2019, consisting of 28 Religious Courts, 27 General Courts, 5 Military Courts and 2 State Administrative Courts.

Langkah Strategis Pembangunan ZI

Sebelum melangkah lebih lanjut dalam pembangunan Zona Integritas, Permimpin sebuah satker wajib mengetahui kekuatan dan kelemahan para pegawai yang berada dibawah kepemimpinannya. Pimpinan harus mampu mengidentifikasi pegawai dalam upaya mendorong semangat untuk sama-sama membangun zona integritas diwilayah kerjanya. Paling tidak ada 3 kategori yang harus dicermati pimpinan terhadap pegawainya, yaitu karakteristik pegawai type pejuang tangguh (pahlawan), karakteristik pegawai type trouble maker (selalu membuat masalah), dan karakteristik pegawai type stagnan (berada di zona nyaman).

Strategic Steps for ZI Development

Before proceeding the construction of the Integrity Zone, the Religious Court Chief must know the strengths and weaknesses of the employees under his leadership. Leaders must be able to identify all employees, in an effort to encourage enthusiasm to jointly build integrity zones in their work areas. There are at least 3 categories that must be observed by the leadership of their employees: tough warrior type employees characteristics (heroes), trouble maker type employees characteristics (always making trouble), and stagnant type employees characteristics (being in the comfort zone).

Seluruh pemimpin satker wajib mengenali 3 tipe pegawai ini, sebagai langkah awal dalam Pembangunan Zona Integritas, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta memaksimalkan segala potensi yang ada dalam satkernya, karena Pemimpin tidak bisa memilih pegawai tipe tertentu, tetapi pasti mendapatkan pegawai dari 3 tipe tadi. Maka tugas pemimpin adalah merangkul dan mendayagunakan mereka semua, sesuai dengan tugas dan proporsinya, dan bukan malah mengeluhkan pegawai dengan tipe tertentu.

All work unit leaders must recognize these 3 types of employees, as a first step in the Development of Integrity Zones, to find out their strengths and weaknesses, as well as to maximize all the potential strenght that exists in their work units, because the leader cannot choose certain types of employees, but certainly will get employees from the 3 types earlier. So the leader's job is to embrace and utilize all of them, according to their duties and proportions, and not to complain about employees of certain types.

Panduan standar dalam Pembangunan Zona Integritas telah ada, diantaranya Surat Keputusan MenPAN RB Nomor 52 tahun 2014, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019, Buku Saku Dirjen Badilag tanggal 11 Februari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Peradilan Agama, serta Surat Dirjen Badilag Nomor 134/DJA/Kp.01.1/I/2020 tertanggal 16 Januari 2020.

There is standard guidelines in the Development of Integrity Zones, including Decree of MenPAN RB Number 52 of 2014, Decree of Chief Justice of the Supreme Court Number 58 / KMA / SK / III / 2019, Director General of Badilag's Pocket Book dated February 11, 2019 concerning Guidelines for Implementing ZI Development towards WBK and WBBM in the Religious Courts, as well as the Director General of Badilag Letter Number 134 / DJA / Kp.01.1 / I / 2020 dated January 16, 2020.

Dengan kata lain, 3 langkah besar yang harus dilakukan dalam membangun Wilayah Zona Integritas adalah (1) Persiapan, (2) Pembangunan, dan (3) Evaluasi dan Penilaian.

In other words, there are 3 major steps that must be taken in developing the Integrity Zone Area: (1) Preparation, (2) Development, and (3) Evaluation and Assessment.

Menginjak langkah Persiapan, hal utama yang harus disiapkan adalah Komitmen, yaitu Semangat pengabdian



untuk melayani, Semangat kerja bukan mengharapkan profit tetapi benefits of the work, Perlakuan yang sama terhadap customer (tidak diskriminasi), Pimpinan dan seluruh aparaturnya memahami proses pembangunan ZI.

On the preparation step, the main thing that must be prepared is Commitment, the spirit of devotion to serve, the spirit of work that does not expect only profit but benefits of the work, the same treatment of customers (not discrimination), the leadership and all apparatus understand the ZI development process.

Persiapan administratif yang harus dilakukan adalah Pembentukan Tim Kerja, Dokumen Rencana Kerja, Penandatanganan Pakta Integritas, Penandatanganan Komitmen, Pencanangan zona integritas, Survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan RB No.14 Tahun 2017), Pemenuhan Eviden (sesuai LKE), APM nilai A Excellent, LKjIP nilai minimal B.

Administrative preparations that must be carried out are the Formation of the Work Team, Work Plan Document, Integrity Pact Signing, Commitment Signing, Declaration of Integrity Zone, Community Satisfaction Survey (Permenpan RB No.14 Year 2017), Evidend Fulfillment (according to LKE), APM value of A Excellent, LKjIP minimum value of B.

Proses Pembangunan tidak bisa serta merta dan tidak bisa dibuat-buat. Contoh kecil: Dokumen dan Eviden mungkin

bisa kita siapkan, akan tetapi tingkah laku dan profesionalitas dalam pekerjaan adalah hal lain, dan ini amat sangat berat.

The Development Process cannot be instantaneous and cannot be made up. A small example: Documents and dividends may be prepared by us, but the behavior and professionalism at work is another thing, and this is very, very difficult.

Maka, dalam Pembangunan Zona Integritas, bisa kita mulai dari hal sederhana: Salam, senyum dan sapa (3S) pada saat memberikan layanan dan biasakan merapikan tempat kerja sebelum meninggalkan kantor (5R), Jangan menunda-nunda pekerjaan dan tertib administrasi (patuhi regulasi), Selalu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan customer/ Stakeholders, Membuat nyaman customer saat menerima layanan, Membuat suasana kerja kondusif dan membangun komunikasi (hormati yang tua dan sayangi yang muda), Mendorong semangat berinovasi pada area layanan publik, dan Publikasikan semua aktifitas dengan memanfaatkan fasilitas website, medsos, dan media massa.

So, in the Integrity Zone Development, we can start from a simple thing: Greetings, smiles and say hi (3S) when providing services, and create a habit to tidy up the workplace before leaving the office (5R), never delay a work and orderly administration (obey regulations), always identify the customers/ stakeholders needs and expectations, make

customers feel comfortable when receiving services, create a conducive work atmosphere and build communication (respect the old and dear young), Encourage the spirit of innovation in the public service area, and Publish all activities by utilizing website facilities, social media, mass media.

Untuk tahun 2020, berdasarkan Surat Dirjen Badilag Nomor : 346/DJA/KP.01/2/2020, tanggal 5 Pebruari 2020, ada beberapa kriteria satker yang diusulkan oleh Ditjen Badilag Untuk Dinilai, yaitu 29 Satker untuk WBBM, 30 satker pernah diusulkan WBK tahun 2019 tetapi belum dinilai oleh TPI dan TPN, dan 228 satker untuk WBK tahun 2020 termasuk Ditjen Badilag.

For 2020, based on the Director General of Badilag's Letter Number: 346/DJA/KP.01/2/2020, there were several religious courts proposed by the Directorate General of Badilag for Judgment: 29 Satker for WBBM, 30 of which had been proposed by WBK in 2019 but has not been assessed by TPI and TPN, and 228 satker for WBK in 2020 including the Directorate General of Badilag.

Proses Penilaian oleh TPI (Tim Penilai Internal)/PMPZI akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode Januari-April 2020, lalu Desk Evaluation Pimpinan dihadapan Evaluator Kemenpan RB pada periode Juni-Oktober 2020, dilanjutkan dengan Penilaian On The Spot oleh Tim Penilai dan Evaluator Kemenpan RB (Okt-Des 2020).

The Assessment Process by TPI (Internal Assessment Team) / PMPZI will be carried out by the Supreme Court Supervisory Agency of the Republic of Indonesia in the January-April 2020 period, then the Leadership Evaluation Desk from RB Kemenpan Evaluator in the June-October 2020 period, followed by an On The Spot Assessment by the Team from Kemenpan RB (Oct-Dec 2020).

Maka untuk tercapainya zona integritas, syarat mutlak yang harus terpenuhi adalah pemimpin yang tangguh dan tidak mudah menyerah, yang dimaksud pemimpin adalah pemimpin disemua tingkatan. Selain itu pemimpin yang tangguh tidak cukup tanpa dibarengi dengan seluruh pegawai yang mendukung untuk bersama-sama berkomitmen membangun zona integritas diwilayah kerjanya.

For the zone of integrity achievement, the absolute requirement that must be met is a leader who is resilient and does not easily give up. In addition, a strong leader is not enough without being accompanied by all employees who support to jointly commit to building an integrity zone in their work area.

Dan akhirnya, semoga seluruh Satker Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, terutama Peradilan Agama, khususnya Satker-satker yang berada dibawah naungan Peradilan Tinggi Agama Bandar Lampung semuanya berhasil meraih predikat ZI, WBK, dan WBBM.

And finally, hopefully all Judicial Office within the Supreme Court, especially the Religious Courts, especially the Satkers under the auspices of the Bandar Lampung Religious High Court, all won the ZI, WBK, and WBBM titles.

Secretary of Director General of Religious Court Agency (Badilag)

Drs. Arief Hidayat, S. H., M.M.

Presentasi Tim Redaksi di hadapan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama terkait materi dan substansi majalah. Dirjen memberi tanggapan positif atas kehadiran majalah ini sebagai representasi dari kehendak menjadikan Peradilan Agama sebagai peradilan taraf internasional. Dirjen juga memberi beberapa masukan untuk penambahan materi dan rencana-rencana ke depannya.

Editorial Board presented contents of the magazine in front of Director General of Religious Court Agency. Director General responded by appreciating it and then citing the magazine would meet our expectation to carry on Religious Court as the international court. Moreover, Director General dropped some recommendations to enhance its contents and future plans





Januari 2019

E-test Calon Peserta Diklat Sertifikasi Ekonomi Syariah

Jum'at 1 Februari 2019, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung menyelenggarakan e-test Calon Peserta Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. e-test dilaksanakan di Aula Utama PTA Bandar Lampung. Hasilnya, Ahmad Satiti, S.Ag., M.H., (nilai 75), Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. (nilai 64) dan Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. (nilai 63) dinyatakan lulus untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. /IDN

E-test for Prospective Participants for Sharia Economic Certification Training

Friday 1st of February 2019, Bandar Lampung Religious High Court held an e-test for Prospective Participants for Sharia Economic Certification Training. Located in the Main Hall Room of Bandar Lampung Religious High Court. As a result, the top three participants are Ahmad Satiri, S.Ag., M.H., (score 75), Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. (value 64) and Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. (score 63). /ENG





Februari 2019

PTA Bandar Lampung Rayakan Hari Jadi Ke-26

Jum'at 22 Februari 2019, PTA Bandar Lampung menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-26. Acara yang sedianya diperingati setiap tanggal 8 Februari tersebut, baru dapat dilaksanakan pada hari Jum'at-minggu, tanggal 22-24 Februari 2019. /IDN

Bandar Lampung Religious High Court Celebrates 26th Anniversary

Celebration of the 26th Religious High Court of Bandarlampung anniversary which was originally commemorated every February 8th, due to various new considerations can be carried out on Friday to Sunday, 22 to 24 February 2019. /ENG



Maret 2019



Pencanangan Zona Integritas PTA Bandar Lampung

Menindaklanjuti Program Prioritas Direktorat Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, PTA Bandar Lampung melakukan Pencanangan Zona Integritas pada Kamis, 28 Maret 2019.

Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Lampung, yaitu Gubernur Lampung diwakili Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Kapolda Lampung, Komandan Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Selain itu, Pencanangan Zona Integritas tersebut dihadiri juga oleh beberapa undangan lainnya, di antaranya Ketua PTUN Bandar Lampung, Kepala Komisi Informasi Provinsi Lampung, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, Komandan Detasemen Polisi Militer Lampung, Ketua MUI Provinsi Lampung, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandarlampung dan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang. /IDN

Religious High Court of Bandarlampung Makes an Declaration of Integrity Zone

Following up on the Priority Program of the Religious Court of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Bandar Lampung Religious High Court conducted the Integrity Zone Declaration on Thursday, March 28, 2019.

The event was attended by the Lampung Province Forkopimda namely the Governor of Lampung represented by the Head of the Lampung Provincial Inspectorate, the Lampung Regional Police Chief, Commander of the Military Resort Command 043 Garuda Hitam, Chief of the Lampung High Prosecutor's Office and Chairman of the Tanjung Karang High Court.

In addition, several invitations were also attended by the Chairman of the Bandar Lampung PTUN, the Head of the Lampung Province Information Commission, the Head of the Lampung Provincial Ministry of Religion, the Lampung Military Police Detachment Commander, the Chairman of the Lampung Province MUI, the Chairman of the Bandarlampung City Election Supervisory Board and the Head of the Tanjung Karang Religious Court. /ENG

Surveillance APM Pertama PTA Bandar Lampung

Tim Penilai eksternal surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu hadir di PTA Bandar Lampung hari senin, tanggal 24 Juni 2019 tepat pada pukul 08.00. Tim Penilai eksternal utusan badilag ini terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari H.A. Pariduddin, S.H., M.H. sebagai lead asesor, Hj. Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.H., M.H. dan Fatin Fiqruna keduanya sebagai Asesor Pendamping. Dalam sambutannya Ketua PTA Bandar Lampung Dr. Nurdin Juddah, S.H., M.H., menyampaikan harapannya agar PTA Bandar Lampung mampu mempertahankan akreditasi "A" Exellent" yang telah diraih satu tahun lalu. /IDN

First Quality Assurance Accreditation (APM) Surveillance at PTA Bandar Lampung

External Assessment Surveillance Team of APM is at Bandar Lampung Religious High Court Monday, June 24, 2019. This External Assessment Team is from badilag, consists of 3 (three) people: H.A. Pariduddin, S.H., M.H. as the lead assessor, Hj. Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.H., M.H. and Fatin Fiqruna are both assessors companion. In his remarks, Chairperson of PTA Bandar Lampung Dr. Nurdin Juddah, S.H., M.H., hope that Bandar Lampung Religious High Court able to maintain "Point A Accreditation" which has been achieved for one year. / ENG





Sosialisasi APM Dan Zona Integritas Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung

Jum'at 26 Juli 2019, seluruh pimpinan Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Bandar Lampung yang berjumlah 14 satker berkumpul di Aula PTA Bandar Lampung dalam rangka mengikuti sosialisasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Zona Integritas (ZI). Acara tersebut dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Sebelum materi sosialisasi disampaikan, acara diawali dengan pengarahan dari Ketua PTA Bandar Lampung, Dr. Nurdin Juddah, S.H., M.H. yang kemudian dilanjutkan oleh Panitera PTA Bandar Lampung, Drs. Darmadi, sekaligus mengevaluasi penyerapan DIPA 04 Tahun 2019 dan monitoring penanganan perkara di Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandar Lampung. /IDN

Quality Assurance Accreditation (APM) and Integrity Zone (ZI) Socialization for Regional Religious Court at Bandar Lampung Religious High Court

Friday 26 July 2019, all Chairman of the Religious Courts in the region PTA Bandar Lampung which totaling 14 office gathered at PTA Hall Bandar Lampung in order to follow the Quality Assurance Accreditation (APM) and Integrity Zone (ZI) Socialization. The event begins at 09.00 WIB until finished.

Before the socialization, the event began with briefing from the Chairman of PTA Bandar Lampung, Dr. Nurdin Juddah, S.H., M.H. followed then by Registrar of PTA Bandar Lampung, Drs. Darmadi, as well as evaluating absorption of DIPA 04 of 2019 and monitoring of case handling in the Religious Courts in the PTA region Bandar Lampung. / ENG

Agustus 2019

Foto kanan:
Pengibaran bendera merah putih dalam rangka Peringatan HUT RI Ke 74

foto tengah:
Ketua PTA Bandar Lampung saat menyampaikan amanat

Right pictures:
Ceremony of the 74th Anniversary of Indonesian Republik.

Middle pictures:
Chairman of the Bandar Lampung Religious High Court convey the message at Ceremony



Foto bawah:
Pemotongan Tumpeng dalam rangka memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke 74

Bottom pictures:
Cutting Deep cone celebrating 74th Anniversary of Supreme Court RI





Pembentukan SATGAS IT PTA Bandar Lampung

Rabu, 4 September 2019 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung membentuk TIM SATGAS IT Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

TIM SATGAS IT tersebut diketuai oleh Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. (Hakim Tinggi) dengan didampingi oleh Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. (Hakim PA metro) sebagai Wakil Ketua, Drs. Yusrizal, M.H. sebagai Koordinator Kesekretariatan, Drs. Darmadi, sebagai Koordinator Kepaniteraan, Ujang Solihin, S.Ag., M.H. sebagai Sekretaris I dan H.Ahmad Syahab, S.H., M.H. sebagai Sekretaris II. /IDN

The Forming of IT Task Force of Bandar Lampung Religious High Court

Wednesday, September 4, 2019 Bandar Religion High Court Lampung forms a IT Task Force Of High Court Religion Bandar Lampung.

This Task Force chaired by Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. (Appellate Judge) accompanied by Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. (Judge of Metro Religious Court) as Deputy Chairperson, Drs. Yusrizal, M.H. as Secretariat Coordinator, Drs. Darmadi, as the Coordinator Registrar, Ujang Solihin, S.Ag., M.H. as Secretary I and H. Ahmad Syahab, S.H., M.H. as Secretary II. /ENG



Oktober 2019

Pelantikan Wakil Ketua PTA Bandar Lampung

Jumat, 4 Oktober 2019, tepat pukul 09.00 WIB, PTA Bandar Lampung melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua PTA Bandar Lampung Dr. Hj. Rokhanah S.H. M.H. sebagai mana Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 136/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. /IDN

Inauguration of Vice Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court

Friday, October 4, 2019, Bandar Lampung implement taking an oath of office and inauguration Vice Chief Judge Bandar Lampung Religious High Court Dr. Hj. Rokhanah S.H. M.H. as where's the Director's Decree General Judicial Agency Religion Number 136/KMA/SK/VIII/2019 on the 29th of August 2019. /ENG



Wakil Ketua PTA Bandar Lampung Dr. Hj. Rokhanah S.H. M.H. berfoto bersama keluarga

Vice Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court Dr. Hj. Rokhanah S.H. M.H. with family



PTA BANDAR LAMPUNG COMMAND CENTER



Foto kiri :

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., saat memberikan arahan kepada peserta sosialisasi 9 aplikasi Ditjend Badilag di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung pada tanggal 15 Oktober 2019.

Left pictures:

Director of Director of Technical Staff Development Directorate General Badilag, Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., give direction to participant about 9 application from General Judicial Agency Religion at Bukit Hotel Randu Bandar Lampung at October 15, 2019.

Oktober 2019



Foto atas, dari kiri : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., Ketua PTA Bandar Lampung Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H., Waka PTA Bandar Lampung Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Top pictures, from left: Director of Technical Staff Development Directorate General Badilag Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H., and Vice Chief Judge of PTA Bandar Lampung Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.



Foto bawah: Peserta Sosialisasi Verifikasi Data Aplikasi Kepegawaian Dirjen Badilag di PTA Bandarlampung. Selasa 15 Oktober 2019

Bottom pictures: Participants in the Dissemination of Verification of Employee Director General Badilag's Application Data Verification at Bandar Lampung Religious High Court. Tuesday 15 October 2019



November 2019



Family Gathering Keluarga Besar PTA Bandar Lampung di Pulau Pahawang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019, diikuti oleh Pimpinan, para hakim tinggi, dan seluruh pegawai PTA Bandar Lampung beserta keluarganya masing-masing. /IDN

Bandar Lampung Religious High Court Family Gathering on the Pahawang Island was held on Sunday 10 November 2019, followed by the Chairperson, Appellate Judges, and all of Bandar Lampung Religious High Court employees and their families. /ENG

Family Gathering
Bandar Lampung
Religious High Court
in Pahawang Island



Desember 2019



Dilaksanakan pada hari Jum'at, 20 Desember 2019 di Hotel Marcopolo Bandar Lampung. Dengan "Tema Permasalahan Tanda Tangan Elektronik pada perkara e-Litigasi di Pengadilan Agama", Diskusi hukum yang rutin diadakan setiap 3 bulan sekali tersebut dihadiri oleh seluruh Panitera Muda, Panitera, Hakim, Ketua dan Wakil Ketua yang ada di PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama yang berada di wilayah PTA Bandar Lampung. / IDN

It will be held on Friday, 20 December 2019 at the Marcopolo Hotel, Bandar Lampung. With "The Theme of Electronic Signature Issues in the Case of e-Litigation in the Religious Courts", the legal discussion which is routinely held every 3 months is attended by all Young Registrars, Registrars, Judges, Chairpersons and Deputy Chairpersons in Bandar Lampung Religious High Court and Religious Courts in the Bandar Lampung Religious High Court area. /ENG



PTA Bandar Lampung dalam Angka



e - Court
The Electronics Justice System

Selama tahun 2019, 12 dari 14 Pengadilan Agama di wilayah provinsi Lampung telah melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-litigasi. Ini menunjukkan bahwa pengadilan-pengadilan di wilayah Lampung telah siap menyongsong tahun 2020 dengan menerapkan e-litigasi secara lebih masih lagi. /IDN

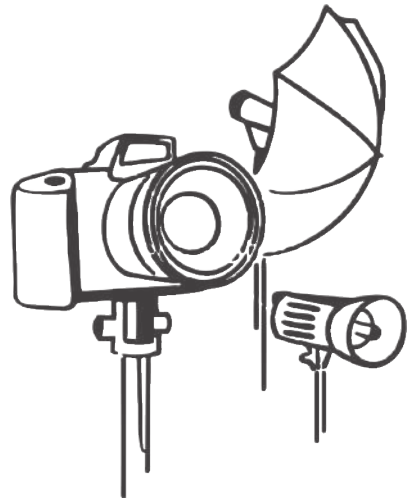
Throughout 2019, 12 of 14 Religious Court in the Province of Lampung has conducted electronic litigation or e-litigation. It shows that courts in Lampung has completely ready to implement e-litigation in 2020. /ENG

DATA PENANGANAN PERKARA DENGAN e-LITIGASI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PTA BANDAR LAMPUNG tahun 2019 - 2020

PA GUNUNG SUGIH (335 e-Court + 1 e-Litigasi)
PA SUKADANA (292 e-Court + 3 e-Litigasi)
PA Metro (246 e-Court + 3 e-Litigasi)
PA Kalianda (230 e-Court + 2 e-Litigasi)
PA Gedong Tataan (180 e-Court + 2 e-Litigasi)
PA Blambangan Ompu (83 e-Court + 2 e-Litigasi)
PA Tanggamus (82 e-Court + 1 e-Litigasi)
PA Pringsewu (68 e-Court + 0 e-Litigasi)
PA Tubateng (49 e-Court + 2 e-Litigasi)
PA Kotabumi (45 e-Court + 1 e-Litigasi)
PA Tulang Bawang (37 e-Court + 1 e-Litigasi)
PA Tanjung Karang (36 e-Court + 0 e-Litigasi)
PA Mesuji (32 e-Court + 1 e-Litigasi)
PA Krui (3 e-Court + 1 e-Litigasi)

Dinamika Peradilan

Judiciary Update



Berisi gambaran umum dan keadaan seluruh Pengadilan Agama sewilayah PTA BandarLampung

All Updates and News from all Religious Courts in Religious High Court of Bandar Lampung region.

Pengadilan Agama **Tanjungkarang**

Tanjungkarang
Religious Court

Pencanangan Zona Integritas PA Tanjung Karang



PA Tanjungkarang telah melaksanakan Pencanangan Zona Integritas pada hari Jum'at, 12 April 2019. Dihadiri oleh Walikota Bandar Lampung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, dan unsur Forum Komunikasi Daerah (FORKOPINDA) Kota Bandar Lampung.

Kegiatan Pencanangan Zona Integritas merupakan upaya dalam rangka membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Tanjungkarang. /IDN

Integrity Zone Declaration of Tanjungkarang Religious Court

Tanjungkarang Religious High Court has carried out the Integrity Zone Declaration on Friday, April 12, 2019. It was attended by the Mayor of Bandar Lampung, Deputy Chair of Bandar Lampung Religious High Court, and elements of the Regional Communication Forum (FORKOPINDA) of Bandar Lampung City.

The declaration of an Integrity Zone is an effort to develop a Free from Corruption Region (WBK) and a Clean and Serving Bureaucracy Area (WBBM) at the Tanjungkarang Religious Court. /ENG

Senam Sehat PA Tanjungkarang

Senam sehat diadakan setiap Jum,at pagi di halaman gedung PA Tanjungkarang, diikuti oleh Pimpinan, Hakim dan seluruh aparatur PA Tanjungkarang.

Karena akal dan fikiran yang sehat berada pada tubuh yang sehat. Maka jika seluruh aparatur yang ada mamapu menjaga kesehatan jasmaninya, maka harapannya adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi legih baik dan berkualitas. /IDN

Healthy Gymnastics at Tanjungkarang Religious Court

Healthy gymnastics at Religious Court of Tanjungkarang is held every Friday morning, in the yard of PA Tanjungkarang building, followed by the Chairperson, Judge and the entire employees of PA Tanjungkarang.

Because a healthy mind and soul are exist in a healthy body. So if all the existing officials are able to maintain their physical health, then the service to the community will be much better. /ENG



Sosialisasi E-Court di PA Metro

E-Court Socialization at Metro Religious Court



Foto kiri:

Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H., pada saat memberikan materi simulasi pemanfaatan aplikasi E-Court di PA Metro pada hari jumat, tanggal 02 Agustus 2019. Acara tersebut dihadiri oleh para Advokat sewilayah Kota Metro, dan dimulai tepat Pukul 13.00WIB atau selepas sholat Jum'at s/d selesai. / IDN

Left pictures:

Drs. Waljon Siahaan, SH, MH, when providing simulation materials how to use the E-Court application in Metro Religious Court on Friday, August 02, 2019. The event was attended by Advocates in the Metro City area, started at 13.00 WIB until it's finished. /ENG

Foto bersama Para Advokat/Pengacara yang berada di Kota Metro

Take a Pictures with Advocates / Lawyers all around Metro City



KPPN METRO AWARDS



PA Metro Kelas IA mendapatkan piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro sebagai Kantor dengan Peringkat Ketiga Terbaik Capaian IKPA Semester II Tahun Anggaran 2019 dengan pengelolaan Anggaran sedang (5.000.000.000,- s/d 25.000.000.000,-). /IDN

Metro Religious Court received an award certificate from the Metro State Treasury Service Office (KPPN) as the Third Rank of the Best IKPA Achievement Semester II of the 2019 with moderate budget management (5,000,000,000, - to 25,000,000,000, -). /ENG



Pengadilan Agama **Gunung Sugih**

Gunung Sugih Religious Court

Buah Manis Perjuangan Pegawai PA Gunung Sugih

Perjuangan seluruh Pegawai PA Gunung Sugih dalam mempersiapkan dan menghadapi surveillace Akreditasi Penjaminan Mutu periode 27-28 Juni 2019 berbuah manis. Pasalnya, pada Rabu, 18 September 2019 Pengadilan PA Sugih telah resmi mendapat predikat "A (Excellent)" untuk hasil Akreditasi Penjaminan Mutu.

Bertempat di hotel Mercure Maha Cipta Jakarta, sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, kepada Ketua PA Gunung Sugih Drs. H. Faiq, MH. / IDN`

Sweet Gift for the Struggle of Gunung Sugih Religious Court

The struggle of all Gunung Sugih Religious High Court Employees in preparing and facing surveillace of the Quality Assurance Accreditation (APM) for the period of 27-28 June 2019 was make a great result. Its secause, on Wednesday, September 18, 2019 PA Gunung Sugih officially received the "Point A Accreditation" for the results of the Quality Assurance Accreditation.

Located at the Mercure Maha Cipta Jakarta hotel, the Quality Assurance Accreditation certificate was handed over directly by the Chairman of the Indonesian Supreme Court Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, to the Chairperson of PA Gunung Sugih, Drs. H. Faiq, MH. /ENG



**Peringatan Hari Ibu Tahun 2019 di
Kabupaten Lampung Tengah**

**Commemoration of Mother's Day 2019
in Central Lampung Regency**



Pada tanggal 22 Desember setiap tahun diperingati sebagai Hari Ibu. Hal ini dilakukan untuk mengingat perjuangan para ibu dalam mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia dalam Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta. Tema yang diusung pada Kongres Perempuan tersebut adalah memperjuangkan hak perempuan dalam perkawinan, melawan perkawinan dini, poligami dan pendidikan perempuan.

Tahun 2019, di tempat yang berbeda, Ibu-ibu Dharma Wanita di Kabupaten Lampung Tengah mengadakan Peringatan Hari Ibu ke 91 yang dilakukan lebih awal dari semestinya ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Nuwo Balak Lampung Tengah dan dihadiri langsung Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto, Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Drs. H. Faiq., MH. /IDN

22th December, every year is celebrated as Mother's Day. This was done to remember the struggles of all mothers in strengthening their mutual enthusiasm and determination to encourage Indonesian independence in the First Women's Congress in Yogyakarta. The theme that was carried out at the Women's Congress was to fight for women's rights in marriage, against early marriage, polygamy and women's education.

In 2019, in a different place, the Dharma Wanita mothers in Central Lampung Regency held the 91st Anniversary of Mother's Day which was conducted earlier than it should, on Thursday 12 December 2019. The event was held in the Building Nuwo Balak, Central Lampung and directly attended by Central Lampung Regent Loekman Djoyosoemarto, Chairperson of Gunung Sugih Religious Court Drs. H. Faiq., MH. /ENG

Iniloh, GPS-nya PA Kalianda!!



Kegiatan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di PA Kalianda telah dicanangkan sejak bulan Juli 2019, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang ke 74 pada tahun 2019 lalu. Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 20 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional.

PA Kalianda terus konsisten melaksanakan GPS tersebut sejak bulan Juli 2019 dan terus diagendakan setiap pagi pada hari rabu dan jumat. /IDN

This is Kalianda Religious Court of GPS!

The activity of the Garbage Collection Movement (GPS) in Kalianda Religious Court has been announced since July 2019, in the context of welcoming the 74th Anniversary of Indonesian Supreme Court in 2019. The activity refers to a Circular from the Ministry of Environment and Forestry dated January 20, 2017 concerning the Implementation of National Waste Day Commemoration.

The Kalianda Religious Court continues to consistently implement the GPS since July 2019 and is scheduled every morning on Wednesday and Friday. /ENG

Bersih indah dan rapih kantorku, nyaman kerjaku, senang tamuku, Ayo Semangat GPS...

My office is tidy and beautiful, my work is comfortable, my guest is happy, This is Spirit of GPS!

Rapat Kerja Tahun 2020 PA Kalianda

2020 Working Meeting of Kalianda Religious Court

Jumat, 10 Januari 2020, bertempat di ruang sidang utama PA Kalianda, pada pukul 09.00 wib berlangsung rapat kerja pengadilan agama Kalianda tahun 2020.

Rapat Kerja tahun 2020 ini mengambil tema "Aktualisasi Program Kerja Untuk Terwujudnya Pengadilan Agama Kalianda Yang Modern". Dalam sambutannya, ketua PA Kalianda Dra. H. Sartini, S.H., M.H. menyampaikan pentingnya perencanaan dan pengembangan program yang baik dan terukur dan betul-betul mengenai sasaran sehingga mampu menghantarkan PA Kalianda menjadi Pengadilan Agama Modern, dan mampu menjawab tuntutan zaman di era digital ini. Yang pada muaranya adalah terwujudnya visi PA Kalianda untuk menjadai Peradilan Agama yang Agung. /IDN

Friday, January 10, 2020, in the main courtroom of the Kalianda Religious Court, at 09.00 am the Kalianda Religious Court held a 2020 working meeting.

This year's Work Meeting took the theme " Work Programs Actualization for the Establishment of the Modern Kalianda Religious Court". In his remarks, the Chief Judge of the Kalianda Religious Court Dra. H. Sartini, S.H., M.H. conveyed the importance of good and measurable program planning and development regarding the target so as to be able to deliver the Kalianda Religious Court into a Modern Religious Court, and be able to answer the demands of the era in this digital era. Which in the beginning was the realization of the Kalianda Religious Court vision to be a great Religious Court. /ENG



Simulasi Penanggulangan Dini Bencana Kebakaran

Kamis, 05 September 2019 PA Tanggamus bekerjasama dengan SATPOL PP Bidang Linmas dan Damkar Kabupaten Tanggamus melaksanakan Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Dini Bencana Kebakaran.

Ketua PA Tanggamu, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan bahwa simulasi tersebut bertujuan sague seluruh aparaturnya PA Tanggamus siap mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk apabila terjadi bencana alam maupun kebakaran. Selain itu, simulasi dan sosialisasi ini merupakan implementasi dari Akreditasi Penjaminan Mutu PA Tanggamus, yaitu Manajemen Resiko. /IDN

Fire Early Disaster Management Simulation

Thursday, September 5, 2019 PA Tanggamus collaborates with SATPOL PP in the Field of Linmas and Damkar Tanggamus Regency implement Disaster Early Disaster Socialization and Simulation.

Chief Judge of Tanggamus Religious Court, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. in his speech said that the simulation was aimed at ensuring that all Tanggamus Religious Court officials were ready to anticipate all possibilities, including in the event of a natural disaster or fire. In addition, this simulation and outreach is an implementation of Tanggamus Religious Court Quality Assurance Accreditation, namely Risk Management. /ENG





Isbat Nikah Terpadu

Kamis, 14 November 2019 bertempat di Aula Islamic Center Kabupaten Tanggamus, Sidang Isbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Tanggamus yang menyidangkan 100 perkara, atau 100 pasangan suami istri kembali digelar. Adapun peserta yang memohon agar pernikahan mereka diisbatkan berasal dari kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung, dan dari Kecamatan Gunung Alip.

Sidang Isbat Nikah Terpadu tersebut terselenggara atas kerja sama Dinas Kependudukan dan Penetapan Sipil Kabupaten Tanggamus, PA Tanggamus dan Kementerian Agama Tanggamus. /IDN



Integrated Wedding Ceremony Isbat Marriage Session

Thursday, November 14, 2019 at the Islamic Center Hall of the Tanggamus Regency, the Integrated Marriage Isbat Marriage Session of the Tanggamus Religious Court which tried 100 cases were held again. The participants who requested that their marriage be attributed came from Pematang Sawa sub-district, Bandar Negeri Semuong sub-district, West Kotaagung sub-district, Kotaagung sub-district, and from Gunung Alip sub-district.

The Integrated Marriage Meeting was held in collaboration with the Office of Population and Civil Registration of Tanggamus Regency, PA Tanggamus and the Ministry of Religion of Tanggamus. /ENG

Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Blambangan Umpu Religious Court

"Pencanangan Zona Integritas, WBK dan WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) PA Blambangan Umpu, 14 Maret 2019"



Dihadiri oleh KPTA Bandar Lampung, Bupati Way Kanan, DANDIM 0427 Way Kanan, KAPOLRES Way Kanan, KAJARI Way Kanan, Ketua PN Blambangan Umpu, serta seluruh unsur FORKOPIMDA Kabupaten Way Kanan dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Way Kanan.

Attended by Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court, Bupati Way Kanan, DANDIM 0427 Way Kanan, KAPOLRES Way Kanan, KAJARI Way Kanan, Chief Judge of PN Blambangan Umpu, as well as all elements of the Regency FORKOPIMDA Way Kanan and Community Public Figure of Way Kanan Regent.

"Designation of Integrity Zone, WBK and WBBM (Free from Corruption Region and Clean and Serving Bureaucracy Area) Blambangan Umpu PA, March 14, 2019"



Sidang Isbat Nikah Terpadu PA Blambangan Umpu di Kecamatan Gunung Labuhan

Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2019. Hasil kerja sama KUA Kecamatan Gunung Labuhan dengan PA Blambangan Umpu dengan menyidangkan 49 perkara permohonan Isbat nikah dari 49 pasang suami isteri yang belum memiliki Buku Nikah.

Setelah permohonan masing-masing pasangan dikabulkan oleh Pengadilan, maka yang bersangkutan dapat langsung mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Gunung Labuhan. Sedangkan untuk Penetapan Pengadilan Agama sudah langsung dapat diterbitkan pada hari itu juga. /IDN

Integrated Isbat Marriage Session by Blambangan Umpu Religious Court in Gunung Labuhan District

It was held on Tuesday, August 21, 2019, as the result of the collaboration between KUA of Gunung Labuhan District and PA Blambangan Umpu, by hearing 49 cases of marriage Isbat applications from 49 couples who do not have a Marriage Certificate.

After the request of each partner is granted by the Court, the person concerned can immediately arrange the Marriage Certificate Quotation Book at KUA Gunung Labuhan District, whereas for the Establishment of the Religious Court, it can be published on the same day. /ENG

Pengadilan Agama Gedong Tataan

Gedong Tataan Religious Court



Court Self Service di PA Gedong Tataan

Court Self Service merupakan layanan mandiri yang disediakan oleh PA Gedong Tataan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak menggunakan jasa Advokat/ Penasihat Hukum. Layanan ini pada prinsipnya menyediakan blanko-blanko dokumen untuk berperkara di PA Gedong Tataan.

Layanan ini menyediakan satu unit komputer desktop berikut printer dan ditempatkan di sebuah meja yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan penyetikan secara mandiri atas dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti suag gugatan/permohonan, ataupun dokumen lain yang dibutuhkan. /IDN

Court Self Service at Gedong Tataan Religious Court

Court Self Service is an independent service provided by PA Gedong Tataan for justice seekers who do not use the services of an Advocate / Legal Counsel. This service in principle provides document blanks for litigation in PA Gedong Tataan.

This service provides a desktop computer unit along with a printer and is placed on a table that can be easily accessed by the public. Thus, the community can do the typing independently of the required documents, such as suag / lawsuit requests, or other documents needed. /ENG



Calon Lokasi Gedung Kantor PA Gedong Tataan

Sekretaris PTA Bandar Lampung, Drs. Yusrizal, M.H. dan didampingi oleh Hakim Tinggi Drs. H. Fuizalman, S.H., M.H., meninjau lokasi tanah calon gedung kantor PA Gedong Tataan bersama-sama dengan Ketua PA Gedong Tataan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gedong Tataan dan Sekretaris Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Lokasi tersebut beralamat di Jalan Raya Kedondong, Dusun Binong, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Posisi tanah bersebelahan dengan Kantor KPU Kabupaten Pesawaran, atau tepatnya berada di samping Kompleks Perkantoran Pemda Pesawaran. Adapun rencana pembangunan gedung kantor tersebut akan dilaksanakan di tahun 2020 ini dengan menggunakan dana DIPA PA Gedong Tataan. /IDN

Prospective Location of Gedong Tataan Religious Court Office Building

Secretary of Bandar Lampung Religious High Court, Drs. Yusrizal, M.H. and accompanied by Appellate Judge Drs. H. Fuizalman, S.H., M.H., reviewed the location of the prospective Gedong Tataan PA office building together with the Chairperson of PA Gedong Tataan, Deputy Chair of the Gedong Tataan District Court and Secretary of the Gedong Tataan Religious Court.

The location is located at Jalan Raya Kedondong, Binong Hamlet, Way Layap Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. The land position is adjacent to the Pesawaran Regency KPU Office, or rather it is located next to the Pesawaran Local Government Office Complex. The office building construction plan will be carried out in 2020 using the Gedong Tataan PA DIPA funds. /ENG

Sita Eksekusi Hak Tanggungan oleh PA Kotabumi

PA Kotabumi melaksanakan Sita Eksekusi Hak Tanggungan atas permohonan Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi, Nomor 1/Pdt.Eks/2019/PA.Ktbm yang didaftarkan pada tanggal 30 Juli 2019.

Pelaksanaan sita tersebut dilaksanakan pada 11 Oktober 2019 yang dipimpin langsung oleh Panitera PA Kotabumi Hj. Soleha, S.Ag., M.H. dan dilaksanakan oleh Jurusita Rusli Burhan, S.H. Adapun lokasi pelaksanaan eksekusi berada di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. / IDN

Execution of Underwriting Right by Kotabumi Religious Court

Kotabumi Religious Court carries out the Confiscation of Mortgage Rights Execution on the application of the Mortgage Right Execution submitted by Kotabumi Sharia Rural Bank (BPRS), case number 1/Pdt.Eks/2019/PA.Ktbm which was registered on 30 July 2019.

The execution was carried out on October 11, 2019 led by the Registrar of Kotabumi Religious Court Hj. Soleha, S.Ag., M.H. and implemented by Jurusita Rusli Burhan, S.H. The location of the execution is in the Village of Kelapa Tujuh, South Kotabumi District, North Lampung Regency. /ENG





Deklarasi Pencanangan Zona Integritas

Kamis, 29 Agustus 2019 di halaman gedung kantor PA Kotabumi, seluruh aparatur PA Kotabumi mengikuti "Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih Bebas dari Korupsi (WBBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)".

Deklarasi tersebut dihadiri oleh KPTA Bandar Lampung, Panitera dan Sekretaris PTA Bandar Lampung, serta Jajaran FORKOPIMDA dan pimpinan Instansi terkait di lingkungan Kabupaten Lampung Utara. Termasuk Bupati Lampung Utara yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Lampung Utara, Kapolres Lampung Utara, Kodim 0412 Lampung Utara, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Pengadilan Negeri Lampung Utara. /IDN

Integrity Zone Declaration of Kotabumi Religious Court

Thursday, August 29, 2019 in the courtyard of the Kotabumi Religious Court office building, all PA Kotabumi employees participated in the "Integrity Zone Development (ZI) Declaration towards Free from Corruption Clean Areas (WBBK) and Clean and Servicing Bureaucracy Areas (WBBM)".

The declaration was attended by Bandar Lampung KPTA, Registrar and Secretary of Bandar Lampung Religious High Court, as well as FORKOPIMDA staff and leaders of related institutions in North Lampung Regency. Including the North Lampung Regent who was represented by North Lampung Regency Secretary, North Lampung District Police Chief, North Lampung District Military Command 0412, North Lampung District Attorney, North Lampung District Court. /ENG

Family Gathering PA Krui Dalam Rangka Memperingati HUT RI ke 74 Tahun 2019 di Taman Hambekhos

Taman Hambekhos adalah sebuah arena Outbond yang terletak di Pekon Kenali, Kecamatan Belau, Kabupaten Lampung Barat, berjarak kurang lebih 22 Km dari kantor Pengadilan Agama Krui. Keluarga Besar PA Krui bertolak dari kantor pada pukul 08:00 WIB, dan setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam lamanya melalui jalan panjang nan berkelok, akhirnya rombongan tiba di lokasi pelaksanaan family gathering pada sekitar Pukul 09:00 WIB. /IDN

Krui Religious Court Family Gathering to Commemorate the 74th Republic of Indonesia Anniversary in Hambekhos Park

Hambekhos Park is an Outbound arena located in Pekon Kenali, Belau District, West Lampung Regency, located approximately 22 Km from the Krui Religious Court office. PA Krui's extended family departed from the office at 08:00 WIB, and after traveling for about 1 hour through a long, winding road, the group finally arrived at the location of the family gathering at around 09:00 WIB. /ENG



Pengadilan Agama Krui Dinobatkan Sebagai Satker Terbaik II oleh KPPN Liwa



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 telah mengadakan Evaluasi pelaksanaan anggaran semester I tahun 2019. Dalam hal tersebut Pengadilan Agama Krui dinobatkan sebagai Satuan Kerja Terbaik II Kategori Satker Dengan Pagu Kecil (Rp. 200jt – Rp. 5 Milyar). Periode Penilaian Semester I tahun 2019, dalam hal Pelaksanaan Anggaran, pelaporan keuangan serta Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang selalu akurat dan tepat waktu. IDN

Krui Religious Court was named the Second Best Work Unit by The Liwa State Treasury Service Office (KPPN)

On Wednesday 31 July 2019, The Liwa State Treasury Service Office (KPPN) conducted an evaluation of the implementation of the 2019 first semester budget. Krui Religious Court was named the Second Best Work Unit on the category "the work unit with Small Ceiling (Rp. 200 million - Rp. 5 billion). In terms of Budget Implementation, financial reporting and Work Unit Level Financial Report Reconciliation, Krui Religious Court consistently filed accurate and timely reports. /ENG

Dahulu Krui, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat. Namun saat ini Krui sudah masuk ke dalam wilayah kabupaten baru, pemecahan dari Kabupaten Lampung Barat. yang bernama Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten baru ini terdiri dari 11 Kecamatan, dan nama Ibukota Kabupatennya adalah Krui.

Gedung PA Krui yang ditempati saat ini dibangun pada tahun 2007 dan beralamat di kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Jl. Mawar No.10 Way Mengaku. PA Krui mewilayahi dua kabupten, yakni Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Meskipun letaknya di KABUPATEN Lampung Barat, yang Ibukotanya bernama Liwa, namun nama PA Krui masih belum berubah. / IDN

Formerly, Krui entered the territory of West Lampung Regency. But now Krui has entered into a new regency area, a breakdown from West Lampung Regency. which is called Pesisir Barat Regency. This new district consists of 11 districts, and the name of the capital of the district is Krui.

The Krui Religious Court building that is currently occupied was built in 2007 and is located in the West Lampung Regency government office complex on Jl. Rose No.10 Way Confess. PA Krui has territory two regencies, namely West Lampung Regency and West Coastal Regency. Ev1n though it is located in West Lampung Regency, whose capital is Liwa, the name Krui Religious Court has not changed. /ENG



H. Abdurrahman, S. Ag., M.H.

Ketua PA Mesuji
Chief Judge of Mesuji Religious Court

Kehadiran PA Mesuji di Kabupaten Mesuji yang berslogan "Bumi Ragab Begawe Caram" ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mesuji secara luas. Atensi besar Bupati Mesuji dan masyarakat terhadap kehadiran PAMesuji dibuktikan dengan penandatanganan MOU Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan Pengadilan Agama Mesuji. MoU tersebut dilakukan tepat satu bulan sejak PA Mesuji beroperasi atau tepatnya pada bulan Nopember 2018. Sidang isbat nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 dengan jumlah 101 perkara atau 101 pasangan suami istri. /IDN

The presence of PA Mesuji in Mesuji Regency whose blog is "Bumi Ragab Begawe Caram" was welcomed by the Mesuji Regency Government and by the entire community of Mesuji Regency. The great attention of the Regent of Mesuji and the community towards the presence of PA Mesuji was evidenced by the signing of the MOU on the Implementation of the Integrated Marriage Marriage Conference Session between the Mesuji Regency Government and the Mesuji Religious Court. conducted exactly one month since PA Mesuji operates or tepatnya in November 2018. Marriage isbat marriage session was held on December 12, 2018 with a total of 101 cases or 101 married couples. /ENG



Foto kanan :*Sidang Pemeriksaan*

Setempat (dessente) terhadap objek sengketa perkara harta bersama yang berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Mesuji.

Perjalanan ditempuh dengan menyusuri sungai besar di tengah hutan

menggunakan otok (kapal sungai), jarak tempuh 2 (dua) jam perjalanan. Sungai inilah yang bernama Sungai Mesuji, yang juga menjadi batas antar Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dengan

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

**Top Picture:**

Local Examination Session (dessente) of objects of dispute over joint property cases in Suka Maju Village, Mesuji District. Traveled along a large river in the middle of the forest using an otok (river boat), a distance of 2 (two) hours drive.

This river is called the Mesuji River, which also forms the boundary between Mesuji Regency, Lampung Province and Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatera Province.



Selayang Pandang PA Pringsewu

Pengadilan Agama Pringsewu berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pringsewu.

Kemudian secara operasional, Pengadilan Agama Pringsewu diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan untuk operasional PA Pringsewu dibuka secara resmi pada tanggal 29 Oktober 2019, dan sudah menerima perkara mulai pada tanggal 1 November 2019. /IDN

About Pringsewu Religious Court

Pringsewu Religious Court was established based on Presidential of the Republic of Indonesia Decree Number 15 of 2016 dated April 26, 2016, concerning the Establishment of the Pringsewu Religious Court.

Then, the Pringsewu Religious Court was inaugurated by the Chief Justice of Indonesian Supreme Court, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H on October 22, 2018 in Melonguane, Talaud Islands Regency, North Sulawesi Province. Whereas for PA Pringsewu's operations were officially opened on October 29, 2019, and have received cases starting on November 1, 2019. /ENG

Ruang PTSP PA Pringsewu

Fasilitas dan sarana yang terdapat pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Pringsewu sudah mendapat penyegaran dan sesuai dengan standar pelayanan yang harus diberikan. Fasilitas yang baru disematkan di ruang terdapat pada pengadilan agama tersebut merupakan Hibah dan Sponsorship Bank Syariah Mandiri (BSM) Kabupaten Pringsewu.

Penyerahan fasilitas tersebut dilakukan langsung oleh Pimpinan Cabang BSM Kabupaten Pringsewu Pipi Prianggodo kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Ridwan Harahap, S.H., M.H. pada tanggal 15 Mei 2019. /IDN

One-Stop Integrated Service Room (PTSP) at Pringsewu Religious Court

In the Pringsewu Religious Court, there is One Stop Integrated Service (PTSP) room that have been refreshed and are in accordance with the standards service that must be provided. The new facility pinned in the right room at the religious court is the Grant and Sponsorship from Bank Syariah Mandiri (BSM) in Pringsewu Regency.

The delivery of the facility was carried out directly by the Head of the BSM Branch of Pringsewu Pipi Prianggodo to the Chief Judge of Pringsewu Religious Court Ridwan Harahap, S.H., M.H. on May 15, 2019. /ENG

Foto bawah :

Ketua PTA Bandar Lampung beserta ibu dan Ketua PA Pringsewu Serta Wakil Ketua Pengadilan Agama Pringsewu berfoto bersama di ruangan PTSP PA Pringsewu yang baru.

Bottom picture:

Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court, Chief of Pringsewu Religious Court, and the Vice Chief of Pringsewu Religious Court took a picture together in the new PTSP room.





Apel Sore di PA Sukadana

Suasana apel jumat sore yang rutin digelar di PA Sukadana. Pada kesempatan hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, Apel dipimpin oleh Hakim PA Sukadana, Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Evening Friday Ceremony in Sukadana Religious Court

The atmosphere of the Friday afternoon ceremony where routinely held at Sukadana Religious Court. On the occasion of Friday, July 26, 2019, Apple was led by Judge of Sukadana Religious Court, Mohammad Ilhamuna, S.H.I.



Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

PA Sukadana Juarai Turnamen Tenis PTWP PTA Bandar Lampung Kategori Tunggal Putra

Pada bulan Agustus 2019 lalu, Hakim PA Sukadana Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. meraih juara 1 dalam pertandingan Turnamen Tenis Lapangan yang diselenggarakan oleh Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) PTA Bandar Lampung yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Kalianda.

Pertandingan tenis tersebut dilaksanakan pada tanggal 10-12 Agustus 2019 di lapangan tenis PELTI Kabupaten Lampung Selatan. /IDN

Religious Court of Sukadana Wins a Religious High Court of Bandar Lampung Tennis Tournament in the Men's Singles Category

In August 2019, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy., Judge of Sukadana Religious Court, won 1st place in the Tennis Tournament competition organized by the PTA Bandar Lampung Citizens Tennis Association (PTWP) in the Kalianda Religious Court. The tennis match was held on 10-12 August 2019 at the PELTI tennis court in South Lampung Regency. /ENG



Tulang Bawang
Religious Court

Pengadilan Agama Tulang Bawang



Rapat Evaluasi Akhir Tahun

Rapat Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Laporan Tahunan untuk Tahun 2019 di PA Tulang Bawang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019.

Adapun agenda rapat adalah untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai selama tahun 2019, sekaligus untuk mempersiapkan penyusunan Laporan Tahunan. Kemudian secara menyeluruh dan bergantian tiap-tiap Pejabat bergantian menyampaikan evaluasi di bidangnya masing-masing. kemudian ditanggapi oleh Pimpinan untuk dicarikan solusi dari tiap permasalahan yang disampaikan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua PA Tulang Bawang H. Soleh, Lc., M.A. dan didampingi oleh Wakil Ketua Nur Said, S.H.I., M.Ag. /IDN

Year-End Evaluation Meeting at Tulang Bawang Religious Court

The Annual Evaluation and Preparation Report for 2019 in Tulang Bawang Religious Court was held on Monday, 2 December 2019.

The meeting agenda is to evaluate the performance already achieved during 2019, as well as to prepare the preparation of the Annual Report. Then, thoroughly and alternately, each Officer alternately submits evaluations in their respective fields, then the Management responded to find a solution for each problem presented.

The meeting was chaired by the Chief of Tulang Bawang Religious Court H. Soleh, Lc., M.A. and accompanied by Vice Chief, Nur Said, S.H.I., M.Ag. /ENG

Sosialisasi 9 Aplikasi Badilag

16 Oktober 2019, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Tulang Bawang, Wakil Ketua dan Para Hakim PA Tulang Bawang yang telah mengikuti Sosialisasi 9 Aplikasi Badilag di Hotel Bukit Randu yang diadakan oleh PTA Bandar Lampung, menyampaikan dan mensosialisasikan materi yang telah didapat pada hari sebelumnya itu kepada seluruh aparat PA Tulang Bawang.

Beberapa point yang disampaikan yaitu tentang Tujuan Pembangunan Aplikasi, Sasaran Penggunaan Aplikasi, Letak Instalasi Aplikasi, dan Konsep Aplikasi. Adapun 9 Aplikasi yang disosialisasikan yaitu Aplikasi Antrian Sidang Online, e-Kepolisian, Basis Data Terpadu Kemiskinan, Informasi Perkara on-line, e-Register, e-Eksaminasi, Notifikasi Perkara, PNBPN, Command Center Badilag. /IDN

Socialization of Nine (9) Innovation Application from Directorate General of Badilag

October 16, 2019, the Vice Chief and The Judge of Tulang Bawang Religious Court who had participated in the socialization delivered and also socialized the material obtained on the previous day.

Some of the points presented were about Application Development Objectives, Application Usage Targets, Application Installation Locations, and Application Concepts. The 9 applications that are socialized are the Online Session Queue, e-Finance, Poverty Integrated Database, Case Information, e-Register, e-Examination, Case Notification, Performance Evaluation Meeting and PNBPN, and Badilag Command Center. / ENG



Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Tulang Bawang Tengah Religious Court



An Integrated Wedding Ceremony Isbat Marriage Session in Tulang Bawang Tengah Religious Court

Sidang Isbat Nikah Terpadu, Kerjasama Polres Tulang Bawang dengan PA Tulang Bawang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang, PA Tulang Bawang Tengah, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Senin, 8 Juli 2019 Pukul 09.00WIB sampai dengan 15.30WIB di Halaman Polres Tulang Bawang, diikuti oleh 42 pasangan suami istri untuk wilayah hukum PA Tulang Bawang Tengah, dan 45 untuk wilayah hukum PA Tulang Bawang. /IDN

Monday, 8 July 2019, from 09.00 WIB to 15.30 WIB, an Integrated Wedding Isbat Marriage Session was held in collaboration with Tulang Bawang Police Departement and Tulang Bawang Tengah Religious Court, Population and Civil Registry Office of Tulang Bawang Regency, Ministry of Religion of Tulang Bawang Regency, Tulang Bawang Tengah Religious Court, Population Office and Civil Registration of West Tulang Bawang Regency, and the Ministry of Religion of West Tulang Bawang Regency.

The Integrated Wedding Isbat Marriage Session was held at the Tulang Bawang Police Precinct, followed by 42 married couples from PA Central Tulang Bawang jurisdiction, and 45 from PA Tulang Bawang jurisdiction. /ENG

Sosialisasi e-LLK (Laporan-Lembar Kerja online)

Sosialisasi e-LLK di PA Tulang Bawang Tengah dilaksanakan pada hari Kamis, 14 November 2019, bertempat di ruang pertemuan pengadilan PA Bawang Tengah, kegiatan tersebut dimulai tepat pada pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai. Diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan PA Tulang Bawang Tengah. e-LLK dapat diakses melalui aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung RI atau SIMARI.

Materi sosialisasi e-LLK diberikan oleh Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana Augustine Pratiwi, S.E. Dalam kegiatan tersebut seluruh Hakim dan Pegawai disosialisasikan bagaimana cara mengakses aplikasi dan mengisi formulir e-LLK. Sedangkan untuk simulasi dan praktek pembuatan akun dan pengisian e-LLK masing-masing pegawai dipandu oleh staff Bagian Analisis SDM dan Aparatur Chici Afrianita Sinaga, S.IP. /IDN

E-LLK Socialization (Online Worksheet-Report) at Tulang Bawang Religious Court

The e-LLK socialization at Tulang Bawang Tengah Religious Court was held on Thursday, November 14, 2019, at Tulang Bawang Tengah Religious Court, began at 13.30 WIB until it was finished, followed by the Chief of Tulang Bawang Tengah Religious Court, Vice Chief, all The Judges and Employees of Tulang Bawang Tengah Religious Court. e-LLK can be accessed through the Indonesian Supreme Court Information System application (SIMARI).

E-LLK socialization material was given by the Head of Subdivision of Organization and Management Staff Augustine Pratiwi, S.E when all Judges and Employees were socialized on how to access applications and fill in e-LLK forms. As for the simulation and practice of making accounts and filling e-LLK each employee is guided by HR Analyst Staff and Apparatus Chici Afrianita Sinaga, S.IP. /ENG



CAKRAWALA

The Horizon

Peradilan Agama Menjawab Tantangan Reformasi Peradilan

Religious Court Responds to Judicial Reform

oleh/by:

M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H.

Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan

Judge of Gedong Tataan Religious Court

TRANSPARANSI, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI, AKUNTABILITAS, SERTA AKSENTUASI PADA KEADILAN MASIH MENJADI PEKERJAAN RUMAH BESAR DUNIA PERADILAN DI INDONESIA

Masalah transparansi misalnya, menjadi semacam “trending topic” dalam pewacanaan lembaga peradilan sebagai lembaga yang terbuka dan accessible (mudah diakses informasinya). Keluhan mengenai transparansi dan masih sulitnya mengakses berbagai informasi mengenai proses maupun teknis yudisial di peradilan agaknya menjadi semacam preferensi untuk menarik akar permasalahan kaitannya dengan transparansi ini. Pun dengan aspek efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan teknis yudisial yang belum mencapai atau sekedar mendekati ekspektasi masyarakat akan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Begitu pentingnya aspek ini, hingga Chief Justice Warren E Burger¹ pernah mengemukakan: “The obligation of our profession is, or long has been thought to be, to serve as healers of human conflict. To fulfill our traditional obligation means

that we should provide mechanisms that can produce an acceptable result in the shortest possible time, with the least possible expense and with a minimum of stress on the participants. That is what justice is all about”²

Judiciary problem on Transparency has been a “trending topic” considering judiciary as the opened dan accessible institution for all of the citizens. Such complaints toward transparency and accessibility of judiciary were raised for many years and it conclude general perception that our judiciary has still “big deal” with transparency. As well as

“Transparency, effectiveness and efficiency, accountability, and accentuation to perform justice are still the unfinished business for the Indonesian judiciary”

transparency, effectiveness and efficiency of judicial administration has yet fulfilled public expectation toward a simple, speedy, and affordable cost of judicial administration. Consequently, Chief Justice Warren Earl Burger stated: "The obligation of our profession is, or long has been thought to be, to serve as healers of human conflict. To fulfill our traditional obligation means that we should provide mechanisms that can produce an acceptable result in the shortest possible time, with the least possible expense and with a minimum of stress on the participants. That is what justice is all about"

Dari pandangan tersebut tergambar bahwa keadilan sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berperkara akan tercapai jika dan hanya jika proses adjudikasi (adjudication process) di pengadilan diselenggarakan dengan mekanisme yang cepat, tepat, dan semaksimal mungkin meminimalisir tekanan-tekanan (fisik maupun psikologis) yang dapat menghambat pengungkapan fakta secara massif di pengadilan. Adversarial system (sistem penyelesaian sengketa berbasis menang dan kalah) yang diimplementasikan di pengadilan sudah cukup menjadi determinan bagi tingginya eskalasi konflik dalam penyelesaian suatu kasus di pengadilan. Karena itu, sudah tidak tepat lagi jika pengadilan hanya berpaku pada suatu pakem yang selama ini diterapkan karena ternyata sangat tidak efisien (wasting time) dan masih jauh dari ekspektasi akan terwujudnya keadilan bagi setiap pihak yang berperkara di pengadilan. Dalam hal ini pula, Warren Earl Burger mengemukakan: "Our system is too costly, too painful, too destructive, too inefficient for a truly civilized people. To rely on the adversary process as the principal means of resolving conflicting claims is a mistake that must be corrected"³

Refers to this view, it was cleared that justice as the main goal in resolving disputes between litigants will be achieved if and only if the adjudication process in the court is carried out with a speedy and precise mechanism, and as much as possible to minimize pressures (physical or psychological) which can inhibit the massive disclosure of facts in court. The adversarial system which is implemented in court has enough power to raise the escalation of conflict between parties in the resolution of a case in court. Therefore, it is no longer appropriate if the court only adheres to a standard that has been applied because it turns out to be very inefficient (wasting time) and is still far from the expectation of justice for every party litigating in court. Thereupon, we considerably understand what Warren Earl Burger has said: "Our

system is too costly, too painful, too destructive, too inefficient for a truly civilized people. To rely on the adversary process as the principal means of resolving conflicting claims is a mistake that must be corrected"

Sistem peradilan yang tidak efisien sangat tidak sesuai diterapkan pada masyarakat yang pola pikir dan perilakunya lebih egaliter, beradab, dan modern. Hal ini dipahami karena masyarakat yang menanjak dalam pola pikir dan perilaku menginginkan proses peradilan yang lebih cepat, efektif, dan efisien serta yang terpenting mampu mewujudkan keadilan substantif seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Pengadilan tidak boleh lagi dibiarkan mempertahankan sistem peradilan yang hanya berpaku pada legalitas formil tetapi mengabaikan aspek substansi dari keadilan itu sendiri.

An ineffective judiciary system is highly incompatible to public expectations who have a set of egalitarian, civilized, and modern minds and behavior. We clearly see this, because people with modern and sophisticate minds expect a speedy, effective, and efficient judicial administration. Besides, they realized that judiciary should perform substantive justice as people expected. We could no longer let our judiciary system stuck in a formalistic model that totally ignores the main aspect of justice itself.



Dunia peradilan Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama sering diidentikkan atribut-atribut negatif. Reputasi dunia peradilan Indonesia bahkan sangat kental dengan presensi akan korupsi yang laten, runtuhnya institusi dan kewibawaan peradilan, serta kompetensi yang rendah pada tenaga-tenaga teknis maupun fungsional peradilan.

For a certain long period of time, The Indonesian judiciary was often identified with negative attributes. The reputation of the Indonesian judiciary is even very strong with the presence of massive corruption, the collapse of judicial institutions and authority, as well as low competence in the technical and functional staff of the judiciary.

Beberapa agenda pembaharuan patut untuk dikedepankan dalam upaya mengembalikan wibawa peradilan di Indonesia. Pertama, pembaharuan yang elementer dapat dimulai dari pembaharuan hukum acara yang selama ini mengacu pada produk perundang-undangan lama yang dalam banyak hal sudah tidak sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Muatan hukum acara yang diimplementasikan saat ini memiliki banyak kekurangan terutama ketika berhadapan dengan hal-hal baru yang pada awal terbentuknya undang-undang dimaksud belum atau tidak terpikirkan. Sebagai contoh, jenis-jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg. hanya mencakup lima, yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sementara dalam perkembangannya, pembuktian mengenai suatu hak, peristiwa dan/atau fakta hukum lainnya tidak hanya terpaku pada kelima hal tersebut, tetapi telah menjangkau data-data dan/atau informasi elektronik, fotokopi, dan sebagainya.

Hereby, we then should design some reformation agendas as an effort to restore the authority of the judiciary in Indonesia. Firstly, elementary renewal can be started from the renewal of procedural law which has been referring to old legislation products which in many cases are not in line with the needs and development of the times. Many aspects in procedural law that is implemented today has some shortcomings, especially when dealing with new things which at the beginning of the formation of the aforementioned laws have not or have not been thought of. For example, the types of evidence mentioned in Article 164 HIR/284 R.Bg. includes only five, namely written evidence, witness evidence, allegations, confessions, and oaths. While in its development, proof of a legal right, event and/or other fact is not only fixated on these five things, but has reached electronic data and/or information, photocopies, and much more.

Kedua, penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih egaliter dan demokratis. Undang-Undang yang baik adalah undang-undang yang menempatkan setiap warga negara pada posisi yang sama; yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengakses keadilan, memperjuangkan hak-haknya, serta menjamin kehidupannya agar lebih sejahtera dan makmur. Undang-undang yang baik juga memberi kesempatan kepada warga negara untuk menyelenggarakan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama, ruang publik-nya, guna menyampaikan aspirasi-aspirasi serta kritikan atas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum yang telah dan sedang dijalankan.

Secondly, the more egalitarian and democratic formation of acts. We see that an exemplary act is an act that give every member of the citizens equal statuses and rights, provides them an equal opportunity of obtaining justice, defending their legal rights, and insisting their better and more prosperous life. An exemplary state act also provides an equal opportunity to declare their willingness in public spaces and criticizing government performances and law enforcement.

Ketiga, dalam rangka mengembalikan wibawa pengadilan sebagai benteng terakhir dalam mewujudkan keadilan, kualitas sumber daya manusia aparatur pengadilan juga perlu untuk ditingkatkan. Pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan dan pendidikan moral secara massif diberikan kepada aparat untuk meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* mereka. Dengan demikian, aparatur pengadilan tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga matang dalam hal akhlak dan perilakunya.

Thirdly, in order to restore the authority of the court as the prime institution in realizing justice, the quality of the human resources of the court officials also needs to be improved. Ongoing training and massive moral education are given to the authorities to improve their hard skills and soft skills. Therefore, the court officials not only intellectually competent, but also mature in terms of morals and behavior.

Dalam konteks ini pulalah, pasca runtuhnya rezim Orde Baru sebagai penanda bagi dimulainya era reformasi, pandangan dan ekspektasi akan penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur, dan bercirikan keadilan berubah. Perubahan itu ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi publik dalam mengawasi dan menilai kinerja lembaga peradilan. Masyarakat perlahan mulai bergerak ke arah pemikiran dan pandangan yang lebih kritis mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi peradilan.

Still discussing how we restore the authority of the court, we found that soon after the fallen of the New Order regime, we shifted the way for the beginning of the era of reform, views and expectations of a clean, honest and characterized justice system have changed. This change was marked by the intensive public participation in overseeing and evaluating the performance of justice institutions. Our community slowly began to move towards more critical thoughts and views on the administration of justice duties and functions.

Blueprint reformasi peradilan yang digagas Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Independensi Peradilan (LeIP) telah memberikan pemetaan secara jelas, sistemik, dan terukur mengenai dari mana dan bagaimana memulai serta melanjutkan reformasi peradilan⁴. *Blueprint* dimaksud telah menyediakan setumpuk skema untuk menjadi panduan, tidak hanya bagi warga peradilan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia untuk melanjutkan reformasi peradilan bagi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

By this time, we all know the blueprint of judicial reforms which was initiated by Indonesia Supreme Court and Judicial Independence Agency

has been provided a clear, systemic, and measurable tools to begin and carry on judicial reform. This blueprint was filled by a set of schemes as guidance not only for the court officials but also for all of Indonesians to carry on judicial reform in which by doing that we can actualize the excellency of Indonesian judiciary.

Pada kenyataannya, melanjutkan reformasi peradilan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Perlu upaya yang gigih dan luar biasa (*an extraordinary manner*) serta patronase dalam mewujudkan hal demikian. Di sinilah Peradilan Agama, sedikit banyak telah memainkan peran tersebut hingga mendapatkan pengakuan luas dari dunia internasional. Beberapa prestasi dan pembenahan yang telah dilakukan Peradilan Agama antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur di lingkungan Peradilan Agama melalui pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan, short course (baik hukum materil maupun hukum formil) di luar negeri, dan sebagainya;
2. Inisiasi peradilan yang modern melalui pengembangan teknologi informasi yang aplikatif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan, misalnya dengan maksimalisasi website pengadilan dalam penyebaran informasi;
3. Reformasi birokrasi yang telah dijalankan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, termasuk di dalamnya pelaksanaan teknis administrasi dan teknis yustisial.

We find then, continuing judicial reform was not as simple as we thought. It takes a persistent and extraordinary effort (an extraordinary manner) and patronage in realizing such a thing. This is where the

Religious Courts, more or less have played that role to get massive acclaim from the external parties. Some achievements and improvements that have been carried out by the Religious Courts, among others:

1. *Improving the quality of officials in the Religious Courts through ongoing training, law courses in the state, and so on;*
2. *Initiation of modern justice through the development of information technology that is applicable in providing the best services for justice seekers, for example maximizing court websites in disseminating information;*
3. *Bureaucracy reform that has been carried out within the Religious Courts by emphasizing transparency and accountability in the implementation of the judicial function, including the implementation of administrative and judicial matters.*

Berkaitan dengan hal tersebut, Cate Sumner dan Tim Lindsey mengemukakan secara tegas bahwa:

"This paper shows how Indonesia's family courts for Muslims — long among the most liberal in the Muslim world — have embraced reform within a judicial system notorious for corruption and incompetence, taking the lead in efforts to deliver decisions that are more accessible, transparent and fair for women and the poor"¹⁵

Still discussing this, Cate Sumner and Tim Lindsey stated: "This paper shows how Indonesia's family courts for Muslims — long among the most liberal in the Muslim world — have embraced reform within a judicial system notorious for corruption and incompetence, taking the lead in efforts to deliver decisions that are more accessible, transparent and fair for women and the poor"

Hasil penelitian Cate Sumner terhadap aksesibilitas peradilan bagi masyarakat yang hidup di bawah

garis kemiskinan menunjukkan bahwa aksesibilitas peradilan agama bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (*people under the poverty line*) cukup tinggi yang disertai dengan kepuasan atas pelayanan yang mereka dapatkan. 79% dari anggota PeKka (Perempuan Kepala Keluarga) yang berperkara di Pengadilan Agama merasa puas atau bahkan sangat puas dengan kinerja dan pelayanan Pengadilan Agama⁶.

The results of Cate Sumner's research on the accessibility of justice for people living below the poverty line shows that the accessibility of Religious Court for people living below the poverty line is quite high, accompanied by satisfaction with the services they receive. 79% of members of PeKka (female heads of families) who have litigated in the Religious Courts are satisfied or even very satisfied with the performance and services of the Religious Courts.

Bagaimana peradilan agama bertransformasi dapat dilihat pada deskripsi yang dikemukakan secara apik oleh Cate Sumner dan Tim Lindsey dalam sebuah penelitian mengenai Akses dan Persamaan bagi Pencari Keadilan yang berperkara di Peradilan Agama sebagai berikut: "...The

findings echoed many of the those from the 2001 study. It found, for example, that 83,3% of court users felt that 'the judges listen to them'; 88,2% fekt that the staff treated them 'with respect at all times'; and that 73% felt that staff were available, and willing, to answer questions and expalin procedures. Seventy-four percent felt that their case had been heard 'quickly and efficiently' and, surprisingly, 63,2% reported that they had found the 'court process very relaxing'. Perhaps, the most significant statistic was, however, the finding that 71,1% oh the 1.000 court users serveyed would 'return to the Religious Courts if they had a 'similar dispute in the future'..."⁷

Hereby, we assume a complete description on how Religious Court transformed from Cate Sumner and Tim Lindsey's research about "Access and Equality fot The Justice Seekers in Religious Court", as follows: "...The findings echoed many of the those from the 2001 study. It found, for example, that 83,3% of court users felt that 'the judges listen to them'; 88,2% fekt that the staff treated them 'with respect at all times'; and that 73% felt that staff were available, and willing, to answer questions and expalin procedures. Seventy-four percent felt that their case had been heard 'quickly and efficiently' and, surprisingly, 63,2% reported that they had found the 'court process very relaxing'.

Catatan Akhir/ Endnote:

1	Warren Earl Burger adalah The 15 th Chief Justice of The United States Supreme Court sejak tahun 1969 sampai tahun 1986. Selama kepemimpinannya, The US Supreme Court berhasil menelurkan beberapa putusan yang bersejarah terutama dalam hal abortion (aborsi), capital punishment (hukuman mati), religious establishment (pembentukan agama), dan school desegregation (desegregasi sekolah, penghapusan diskriminasi atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi warga pribumi). Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_E._Burger
2	http://www.familydisputeresolution.com/
3	http://www.fsmlaw.org/fsm/decisions/vol3/3fsm015_017.htm
4	Ibid, h.13.
5	Ibid, h.vii.
6	Cate Sumner, Providing Justice to The Justice Seeker: A Report on the Access and Equity Study in the Indonesian General and Religious Courts 2007–2009, Mahkamah Agung and AusAID, 2010, h. 35.
7	Cate Sumner and Tim Lindsey, Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice for The Poor, dalam International Journal for Court Administration, Seventh Issue, Vol. 4 No. 1, International Association for Court Administration (IACA), h. 6.

Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama dalam menangani jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama tidak akan dimiliki oleh badan peradilan yang lain. Contohnya, kewenangan Pengadilan Agama dalam menenagani perkara perceraian bagi orang-orang beragama Islam, atau orang-orang yang menikah dengan menggunakan hukum Islam, tidak bisa diadili di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Singkatnya, Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan sengketa ekonomi syari'ah.

Selain itu, Pengadilan Agama juga diberi kewenangan untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam kepada Institusi Pemerintah di wilayah hukumnya. /IDN

Absolute Competence

Absolute competence is the Religious Court authority in handle the types of cases that are under his authority. Absolute competence possessed by the Religious Courts will not be owned by any other judiciary. For example, the Religious Courts authority in handling divorce cases for Muslims, or people who marry using Islamic law, cannot be tried in a District Court or State Administrative Court.

In short, the Religious Courts have the competence to receive, examine, decide upon and settle matters in the fields of Marriage, Inheritance, Wills, Grants, Endowments, Zakat, Infaq, Sadaqah, and Shari'ah economic disputes.

In addition, the Religious Courts are also given the authority to provide information, considerations, and advice on Islamic Law to Government Institutions in their jurisdictions.
/ ENG

Kompetensi Relatif



Kompetensi relatif Pengadilan Agama yaitu kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya, atau yurisdiksi.

Contohnya Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Pengadilan Agama Metro, masing-masing merupakan satu jenis dalam satu wilayah tertentu, yaitu Pengadilan Tanjung Karang mewilayahinya Kota Bandar Lampung, sedangkan Pengadilan Agama Metro mewilayahinya Kota Metro. Dan keduanya berada dalam satu tingkatan pengadilan yang sama, yaitu pengadilan pada tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan tingkat bandingnya adalah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yang mewilayahinya seluruh pengadilan agama yang ada di seluruh provinsi Lampung. /IDN



Relative Competence
Court's relative competence is the authority of the Religious Court in handling a case based on its jurisdiction.

Relative Competence :

For example, Religious Court of Tanjung Karang and Religious Court of Metro, each of which is one type in one particular region, namely Religious Court of Tanjung Karang in the Bandar Lampung City, while the Religious Court of Metro is in the Metro City. Both of them are in the same court level, which is the court in the first level. Whereas the appellate court is Religious High Court of Bandar Lampung, which covers all religious courts in all Lampung provinces. /ENG

Putusan Verstek

"Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut"

Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.

Namun, putusan verstek tidak serta merta dapat dieksekusi sebelum lewat waktu 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan putusan verstek oleh majelis hakim yang mengadili perkara. Dalam waktu 14 (empat belas) hari pihak tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan tersebut, maka dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan verstek kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan verstek. /IDN

Default Judgment

Default Judgment is an exception from the trial program as a result of the defendant's absence due to unauthorized reasons. In the verstek program, it was considered that he did not attend the trial without a valid reason and the defendant was considered to have fully and completely acknowledged all the plaintiff's claim. Verstek verdicts can only be handed down in the event that the defendant or the defendants is absent on the day of they/ their first trial.

However, the verstek verdict can't be executed before 14 (fourteen) days after notification of the verstek decision by the panel of judges. If Within 14 (fourteen) days the defendant who was defeated by the verdict did not accept the verdict, then he can submit a resistance (verzet) of the verstek verdict to the court that sentenced the Default Judgment. / ENG

How is Lawsuite Disposed by Default Judgment???

Default Judgment is a verdict handed down by the Panel of Judges without the presence of the defendant that without a valid reason although it has been formally and properly summoned

Putusan Gugur

Putusan Gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan. /IDN

Default Judgment Against The Plaintiff

Default Judgment Against The Plaintiff is a verdict which states that a lawsuit/the application was canceled because the plaintiff/applicant never attended the trial, even though he had been formally and properly summoned. The verdict is dropped in the first trial or thereafter before the reading of the lawsuit/petition. /ENG

Putusan Tidak Dapat Diterima/ NO

Putusan niet ontvankelijke verklaard atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Misal gugatan yang ditandatangani kuasa hukum yang tidak memenuhi syarat formil, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium, gugatan mengandung cacat obscuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Terhadap NO, yang diputus karena pemeriksaan dan pertimbangan hukum dari pengadilan atas perkara tersebut belum menyentuh pokok perkara, maka terhadap perkara tersebut dapat diajukan gugatan baru tanpa terikat dengan asas nebis in idem. /IDN

Dismissal Decision

Dismissal Decision or Niet Ontvankelijke Verklaard Verdict (N.O. verdict) is a verdict stating that a lawsuit cannot be accepted because it contains formal defects. For example, a lawsuit signed by a legal representative that does not meet formal requirements, a lawsuit has no legal basis, an error in persona in the form of disqualification or plurium litis consortium, a lawsuit containing defects obscuur libel, nebis in idem, or violates absolute or relative jurisdiction (competence).

Against the N.O. verdict, because the examination and legal considerations of the court on the case have not touched the subject matter, the new case can be filed without being bound by nebis in idem principle. /ENG

Apa Kata Mereka...??

Congrat...

Congratulations to the Religious High Court of Bandarlampung for the launch of the Bilingual Magazine. This magazine is an excellent source for Indonesian judicial officers and broader community to keep up not only the recent development of religious courts in Lampung Province but also legal terms in English.

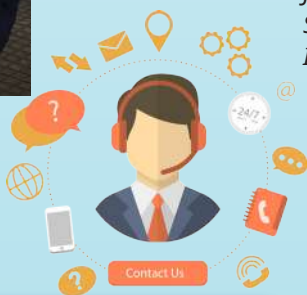
I hope this publication may help bridge International community to understand the current progress of the religious court in Indonesia.

Bravo...!!!!



Achmad Cholil

Judge appointed at the Supreme Court (Hakim Yustisial MA RI) and a graduate of Melbourne Law School Australia



So Cool...

Tribunal Magazine was designed to be issued digitally as e-magazine. It completely responds our move in shifting paper based to paperless.

Besides, its bilingual (Indonesian-English) presentation contrasting the magazine at all. It's definitely a stand out breakthrough by my colleagues in Bandar Lampung Religious High Court. We, then, could both earn new horizon related to judiciary and learn foreign language which are could enhance our knowledge.

Edi Hudiata

Justicial Judge in the Supreme Court of Indonesia



Abdul Halim

Justicial Judge in the Religious Court Agency

Have a good reading...

This maiden issue has just shown us great passion and enthusiasm in Bandar Lampung Religious High Court to encourage our judiciary. It was designed to make our judiciary approached by the public as well to disseminate judiciary information to all of stakeholders, so that they can build synergy to establish excellent services especially to the public in Lampung.





Ketua PTA Bandar Lampung

Dr. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H.

Lahir di Bone, pada tanggal 31 Desember 1954.

Adapun Riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

- Sekolah Rakyat Negeri 6, Badjoe
- MTsN Watampone
- SPIAIN Alauddin, Watampone
- D3 Hukum Umum, Dasar Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang
- D3 IAIN Alauddin, Ujung Pandang
- S1 IAIN Alauddin, Ujung Pandang
- Hukum Perdata, Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang
- S2 Hukum Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang S2
- S3 Syari'ah, UIN Alauddin, Makassar

Riwayat Pekerjaah:

- 1983 : Hakim PA Sungguminasa
- 1986 : Hakim Tinggi PTA Makassar
- 2008 : Wakil Ketua PTA Palu
- 2012 : Wakil Ketua PTA Banjarmasin
- 2016 : Ketua PTA Ambon
- 2019 : Ketua PTA Bandar Lampung



Wakil Ketua PTA Bandar Lampung

Dr. HJ. ROKHANAH, S.H., M.H.

Lahir di Pekalongan, tanggal 12 Februari 1960

Adapun Riwayat Pendidikan adalah sebagai berikut:

- SD Muhammadiyah Wuled
- SLTP PGAN
- SLTA PGAN
- DIII IAIN
- S1 IAIN
- S1 Universitas Diponegoro
- S2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- S3 Universitas Jayabaya Jakarta

Riwayat Pekerjaan:

- 1989 : Hakim Pengadilan Agama Mamuju
- 1993 : Hakim Pengadilan Agama Semarang
- 2002 : Wakil Ketua Pengadilan Agama Sragen
- 2007 : Ketua Pengadilan Agama Ambarawa
- 2012 : Ketua Pengadilan Agama Karawang
- 2013 : Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- 2015 : Hakim Tinggi PTA Medan
- 2018 : Wakil Ketua PTA Bengkulu
- 2019 : Wakil Ketua PTA Bandar Lampung



From Lampung to The World

Dari Lampung Untuk Dunia



Alamat Redaksi / Address:

Jl. Basuki Rahmat No.24 Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara,
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35211
email : reduktur.tribunalbandarlampung@gmail.com